

JURNAL

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PRATIMA MENURUT HUKUM ADAT BALI



Disusun oleh:

DESAK ALFA INTAN R.D

NPM	: 110510583
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PRATIMA
MENURUT HUKUM ADAT BALI**



**Diajukan oleh:
DESAK ALFA INTAN R.D**

NPM : 110510583
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 11 Maret 2015
Dosen Pembimbing**

P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PRATIMA MENURUT HUKUM ADAT BALI

Desak Alfa Intan RD, P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS.

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

Lately the theft of sacred objects (pratima) in Bali increasingly frequent. In indigenous Balinese such actions are classified as offenses against property. Property that is meant here is that tangible objects and given a specific meaning. Sacred objects is among other things used as a means or infrastructure sacred religious ceremonies and growth is normally recorded in holy places (temple), because the objects that are sanctified (pratima) is a tool in the implementation of religious ceremonies by Hindus believed have supernatural powers. Theft of sacred objects is a form of desecration of Hindu religion contained in *awig awig* it is detrimental to the people of Bali, especially the Hindu religion. While the process of finalizing its case only using only the Criminal Code and the lack of attention to local customary law as the best material consideration in making the decision when sentenced. The method used is a normative method supported empirical methods. Results of research on the theft of sacred objects (pratima) can be turned out in Bali court in imposing sanctions on the perpetrators of the crime of theft of sacred objects have not noticed aspects of customary law in Bali, it causes dissatisfaction Balinese against the decision of the District Court in Bali, because the decision has not accommodate customary law Bali given the local customary criminal law has a perspective that the purpose of the sanctions given to the perpetrators not only provide a deterrent effect, but also restore the cosmic balance in society.

Keyword : theft, sacred objects (pratima), customary criminal law

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Hukum yang diciptakan manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib, demikian pula dengan hukum adat. Menurut Van Vollenhoven hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan¹. Namun belakangan ini dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan pengangguran yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah cenderung tidak memperhatikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara yaitu dengan melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Berdasarkan pemberitahuan dari media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya di latar belakang karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Dewasa ini tindak pidana pencurian mengalami peningkatan. Tindak pidana pencurian dapat ditemukan dalam masyarakat manapun,

¹ Iman Sudiyat, 1982, Asas-asas Hukum Adat, edisi ke 3, Liberty Yogyakarta, Hlm 5.

begitu juga di Bali. Tindak pidana pencurian dianggap sebagai suatu fenomena yang luar biasa dan menjadi suatu *issue* menarik manakala obyek pencurian adalah benda-benda sakral (benda-benda yang disucikan/dikeramatkan) seperti keris, uang logam (*pis kepeng*), pratima. Salah satu benda yang disakralkan adalah pratima (patung yang disucikan) yang akan penulis teliti karena sering terjadi pencurian pratima sebagai benda yang di sakralkan oleh masyarakat Hindhu di Bali sebagai sarana atau media pemujaan kepada Ida Shang Hyang Widi Wasa beserta manifestasiNya.

Benda-benda yang disakralkan oleh masyarakat Hindhu di Bali memang hanya tampak seperti benda mati biasa, namun dalam kaitannya dengan masyarakat Hindhu di Bali, pratima itu disucikan karena merupakan simbol sebagai media pemujaan untuk memuja Tuhannya, maka dari itu pratima tersebut ditempatkan di tempat suci yaitu di pura yang kesucian dan keamanannya terjaga dengan baik dan tidak boleh sembarang orang untuk memegang.

Pencurian benda sakral termasuk dalam delik terhadap harta kekayaan. Benda-benda sakral termasuk harta benda, (harta benda yang dimaksudkan di sini adalah benda-benda yang berwujud dan diberikan makna tertentu). Benda sakral yang dimaksud antara lain benda yang dipergunakan sebagai sarana atau prasarana upacara keagamaan dan umumnya dikeramatkan di tempat-tempat suci (pura), karena benda-benda yang disucikan tersebut (pratima) merupakan sarana dalam

pelaksanaan upacara-upacara keagamaan yang oleh umat Hindu diyakini mempunyai kekuatan ghaib. Pencurian pratima umumnya tidak saja mengakibatkan kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil yang berakibat terhadap gangguan keseimbangan magis. Kejahatan seperti ini merupakan tindakan yang sangat amat merugikan masyarakat di Bali khususnya penganut agama Hindhu karena dianggap sudah merusak keseimbangan hidup masyarakat, para pelaku juga dianggap melecehkan aturan adat yang tertuang di dalam *awig-awig* di Bali. Pencurian pratima itu merupakan bentuk penodaan terhadap agama dan para pelaku juga dianggap telah merusak cagar alam mengingat pratima yang ada di Bali itu merupakan bagian dari benda cagar budaya dan warisan turun temurun.²

Untuk mengembalikan keseimbangan tersebut, menurut keyakinan masyarakat diperlukan ritual-ritual keagamaan. Maka dari itu harus dipulihkan terhadap pelaku kejahatan dengan dijatuhkan pidana dan tentu saja ada reaksi dengan sanksi adat agar keadaan kembali seimbang sebagai bentuk reaksi dan koreksi masyarakat. Sanksi adat adalah berupa reaksi terhadap desa adat untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: Apakah pengadilan dalam

² | Ketut Sandika, 2011, *Pratima Bukan Berhala*, Paramita, Surabaya.

menjatuhkan sanksi pada pelaku tindak pidana pencurian pratima memperhatikan aspek-aspek hukum adat di Bali?

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Pidana

Menurut Soedarto di dalam bukunya pidana atau sering juga disebut dengan pemberian pidana memberikan dua makna dalam arti umum yaitu pemberian pidana (*poena*) oleh pembentuk Undang-Undang adalah hal penetapan sanksi hukum pidana. Batasan ini didasarkan pada penganutan Asas Legalitas dari zaman Aufklarung yang menentukan bahwa dalam pengenaan pidana diperlukan Undang-Undang lebih dahulu. Petunjuk Undang-Undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya. Sedangkan dalam arti khusus atau kongkrit yaitu menyangkut berbagai badan atau lembaga yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum tersebut.³

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

³ <http://samardi.wordpress.com/2012/09/17/buku-buku-yang-mengkaji-hukum-pidana-di-indonesia/>, diakses pada hari kamis 2 oktober 2014, pukul 14.05.

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴ Di dalam KUHP dikenal istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan Undang-Undang mempergunakan peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁵

C. Tinjauan Tentang Pengertian Pencurian dan Tindak pidana Pencurian

⁴ Tri Andrisman, 2009 *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Hlm 70.

⁵ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 90.

Menurut Pasal 362 KUHP yang dimaksud dengan pencurian ialah:

“barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dengan melakukan suatu kejahatan berupa pencurian yang merugikan orang lain. Suatu perbuatan atau peristiwa tersebut baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana pencurian manakala terdapat unsur-unsur objektif yang terdiri dari perbuatan mengambil, objek suatu benda, unsur keadaan yang melekat pada benda yang merupakan milik orang lain, dan terdapat unsur subjektif yang terdiri dari adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dengan melawan hukum.

D. Tinjauan Tentang Pratima Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari penulis, menurut Ida Pedande Made Gunung selaku tokoh dan pemuka agama pada masyarakat Hindhu di Bali, pratima merupakan sebuah benda yang disakralkan oleh umat Hindhu yang sangat bernilai religius, karena menurut beliau untuk meyakini Tuhan manusia itu membutuhkan suatu simbol untuk menyatukan pikirannya dengan Tuhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari penulis, menurut Ida Pedanda Made Gunung selaku rohaniawan dan pemuka agama Hindhu di Bali, jika berbicara pratima pasti tidak lepas dari sejarah perkembangan agama Hindhu di Indonesia. sejarah perkembangan agama Hindhu di bagi menjadi 4 periode yaitu;

- 1) Bali Kuno: sebagai simbol manifestasi umat Hindhu pada waktu itu belum menggunakan pratima, tapi menggunakan batu.
- 2) Abad 7: sebagai simbol manifestasi umat Hindhu pada waktu itu menggunakan "*bale-bale*".
- 3) Abad 11: sebagai simbol manifestasi umat Hindhu pada abad ini baru muncul pratima.
- 4) Abad 15 dan 16: pada masa Dwijendra selain pratima juga ada kapak mlinggih sebagai simbol manifestasi.

E. Analisis Data yang Diperoleh Dari Para Narasumber dan Putusan Terkait Tindak Pidana Pencurian Pratima Oleh Pengadilan Negeri Gianyar (No.178/Pid.B/PN.Gir)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ida Pedanda Made Gunung selaku rohaniawan dan pemuka agama Hindhu di Bali, beliau secara pribadi menanggapi bahwa kasus pencurian pratima itu secara umum sudah ada suatu indikasi bahwa manusia tidak lagi meyakini Tuhannya, yang kedua manusia tidak tahu bahwa tujuan beragama itu apa. Padahal untuk meyakini Tuhannya

manusia membutuhkan suatu simbol. Simbol itu bisa berupa benda seni atau benda yang disakralkan yang mempunyai fungsi untuk menyatukan pikiran dengan Tuhannya. Dalam Kitab Yajurweda XXXII.3 disebutkan “Tuhan itu tidak punya wujud, meskipun demikian Tuhan merupakan sumber dari wujud dan memberikan daya hidup pada semua wujud”. Jadi kalau sampai ada kasus pencurian Pratima berarti manusia yang mencuri itu sudah ada indikasi tidak meyakini Tuhannya. Lalu tata cara penghukuman menurut hukum adat Bali itu hanya berlaku untuk orang adat Bali saja. Kalau yang mencuri bukan orang Bali atau orang asing, sanksi hukum adat Bali tidak berlaku.

Semestinya di negara Pancasila seperti kita sekarang ini yang meyakini Tuhan dan membebaskan orang untuk memeluk agamanya, pemerintah harus membuat peraturan supaya bisa membedakan antara pencurian barang sakral atau benda yang bernilai religius dengan benda biasa. Walaupun nilai fisik tidak terlalu mahal tapi nilai rohaninya sangat berarti untuk masyarakat yang meyakini. Sayangnya Negara kita tidak atau belum menyiapkan hal itu. Melalui skripsi ini narasumber meminta supaya diusulkan kepada pemerintah agar menyiapkan peraturan atau Undang-Undang terkait tentang pencurian barang sakral. Karena jika pencurian pratima disamakan dengan pencurian cincin menurut narasumber itu tidak memberikan rasa

keadilan kepada masyarakat Hindhu. Padahal kalau di pengadilan yang digunakan adalah hukum KUHP saja sebetulnya tidak cukup.

Kalau yang mencuri orang Bali, dimana saja dia melakukan delik adat, walaupun beda kabupaten pasti akan dikenakan sanksi.

Sanksi adat Bali ada 3 hal yaitu:

1. Sangaskaradanda, adalah sanksi terhadap mereka yang berbuat jahat dengan cara melakukan serangkaian upacara adat Bali.
2. Arthadanda, adalah sanksi terhadap mereka yang berbuat jahat dengan cara membayar sejumlah uang denda.
3. Kasepekang, adalah sanksi terhadap mereka yang berbuat jahat dengan cara dikucilkan bahkan diusir dari desa pakraman.

Kepada pelaku yang sedang menjalani sanksi arthadanda jika tidak kuat membayar denda bisa di musyawarahkan lagi dalam rapat desa, yang pada intinya hukum adat Bali akan membuat efek jera pada pelakunya dan mengembalikan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu. Lalu kepada pelaku yang sedang menjalani sanksi pidana dan sanksi adat Bali yang didahulukan adalah sanksi pidana dulu baru sanksi adat Bali, karena dalam kepercayaan Hindhu meyakini “Dharma negara dan Dharma agama”.

Saran dari narasumber, pratima itu harus dijaga oleh masing-masing moral manusia. Kalau moralnya saja sudah hancur pratima ditaruh dimana saja bahkan dengan tingkat keamanan tinggipun juga bisa hilang

karena moral yang dimiliki manusia itu sudah rusak. Narasumber meminta kepada pemerintah untuk jangan memandang sebelah mata masalah pencurian ini, karena narasumber sudah merasa risih dan merasa penjatuhan hukuman terhadap pencurian pratima itu kurang dirasa memberikan keadilan. Pemerintah harus melihat bagaimana moralitas dan perasaan orang yang kehilangan itu, karena pratima merupakan barang yang disucikan dan nilainya tidak terhitung .

Masalah putusan yang diberikan oleh hakim apakah putusannya sudah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Hindhu, narasumber tidak menyalahkan, karena pengadilan menjalankan hukum KUHP yang berlaku. Kalau misalnya ada yang menanyakan mengapa umat Hindhu tentang kasus ini saja protes, itu sama saja halnya dengan gereja di Vatikan misalnya ada benda yang disucikan lalu dipercantik dengan lapisan emas atau benda berharga yang disakralkan di masjid itu lalu dicuri, narasumber yakin pasti juga akan timbul keresahan yang sama. Jadi sadarlah orang Indonesia, aparat Indonesia bahwa Indonesia adalah negara Pancasila yang meyakini Tuhan pasal 29 ayat (1) dan (2) dan titik tolaknya Pancasila.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis oleh I Gusti Agung Mk. Adiarta, M.Si selaku Ketua Parisada Hindhu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Gianyar terhadap pencurian pratima yang merupakan tergolong benda yang disakralkan umat Hindhu adalah merupakan sebuah perilaku atau tindakan yang tidak berketuhanan dan

mempunyai moral yang sangat rendah, tidak bisa mengerti bahwa perbuatan tersebut berdampak buruk bagi keseimbangan masyarakat umat Hindhu. Seolah-olah tidak punya *Sradha Bhakti* kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa maupun dirinya sendiri yang sangat tidak beretika.

Sarannya sebaiknya pratima itu dijaga jangan sampai lengah, karena para pencuri pratima pada dasarnya hanya berfikir keuntungannya saja tanpa berpikir dampak besar yang merugikan masyarakat Hindhu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Hakim Aryo Widiatmoko di Pengadilan Negeri Gianyar, terkait dengan pencurian pratima itu hanya dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian saja, mengingat bahwa pratima itu juga merupakan cagar budaya yang dimiliki Indonesia. Jika dilihat dari syarat apakah pratima masuk di kategorikan sebagai cagar budaya, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya jawabannya adalah iya, karena pratima memiliki nilai yang penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan masyarakat Hindhu. Tapi, disini hakim memiliki sifat hanya menerima apa yang diberikan oleh jaksa. Kalau jaksa hanya mendakwa bahwa pencurian pratima hanya dikenakan pasal 362 saja, hakim hanya sebatas menangani pasal 362 saja. Jadi hakim dalam menangani kasus pencurian pratima menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik dan bagaimana saran dari kejaksaan saja. Kejaksaan tidak serta merta juga sudah P.21 mereka bisa P.19 untuk dikembalikan lagi kepada penyidik untuk dikembangkan lebih lanjut. Tapi kalau sudah

masuk ke pengadilan itu sifatnya sudah final. Jadi kalau hanya dikenakan pasal pencurian saja, hakim tidak bisa menambahkan pasal tentang cagar budaya.

Lalu menjawab pertanyaan penulis kepada narasumber apakah dalam putusan hakim melihat aspek-aspek hukum adat yang ada di Bali, dengan tegas narasumber menjawab dalam putusan selalu melihat aspek-aspek adat. Kebanyakan pertimbangan aspek-aspek tersebut selain hukum pidananya yang diatur dalam KUHP Hakim juga memasukan dalam hal-hal yang memberatkan. Sebelum masuk ke pidana, hakim selalu akan mempertimbangkan apa yang memberatkan terdakwa dan apa saja yang dapat meringankan terdakwa. Misal dalam contoh putusan Nomor: 178/Pid.B/2006/PN.Gir tentang pencurian pratima ada unsur-unsur delik disebutkan para terdakwa sudah membuat nama baik umat beragama Hindhu tercoreng, para terdakwa menimbulkan keresahan, dan para terdakwa merugikan orang lain baik moril maupun materiil. Menurut narasumber unsur itu merupakan aspek adat yang secara tidak langsung disertakan dan masuk di perihal untuk memberatkan terdakwa. Pengalaman pribadi narasumber, selama bertugas dalam hal mempertimbangkan putusan, narasumber selalu melihat adat setempat karena hukum pidana itu tidak bisa lepas dari hukum adat. Kalau masalah sanksi karena majelis itu dalam menangani perkara tidak hanya sendirian, yang terdiri dari satu hakim ketua dan dua hakim anggota, jika diberi satu perkara hasilnya bisa beda dan tidak sama karena tergantung dari segi mana majelis itu melihat.

Kalau misal dalam pencurian pratima ada yang menganggap bahwa pencurian pratima bisa merusak tatanan hukum adat dan merusak keseimbangan masyarakatnya, majelis bisa memberatkan dan bisa meringankan itu tergantung dari keyakinan pribadi masing-masing majelis. Karena apapun keyakinan majelis, majelis diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bisa memakai keyakinannya untuk menentukan rasa keadilan. Kalau ditanya apakah sudah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sampai sekarang belum ada kata baku definisi kata adil itu bagaimana karena keadilan itu relatif. Kita hanya bisa memutus yang mendekati rasa keadilan saja.

Untuk saran, narasumber merasa tidak bisa untuk memberi saran karena yang diteliti itu adalah produk kami. Yang lebih berhak untuk memberikan saran adalah pihak luar karena kami sifatnya menerima masukan. Kalau misalnya ada peraturan yang mengatur tentang pencurian pratima kami juga akan melihat Undang-Undang mana yang lebih tinggi.

Analisis Putusan Terkait Tindak Pidana Pencurian Pratima Oleh Pengadilan Negeri Gianyar (No.178/Pid.B/PN.Gir) adalah Bahwa mereka Terdakwa (I) I Gede Mardika alias Mangku yang bertempat tinggal di Jl. Pungutan Nomor 22 sanur, Kabupaten Karangasem dan Terdakwa (II) I Nengah Wanti yang bertempat tinggal di Jl. Marlboro, Desa Sambirenteng, Kabupaten Buleleng. Pada bulan Maret tahun 2006 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2006 telah melakukan tindak pidana pencurian yaitu

dengan mengambil barang-barang sakral berupa 8 (delapan) bancang/tangkai bunga emas dan 1 (satu) ikat uang kepeng yang bertempat di Pura Pasek Gelgel, Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yakni milik warga masyarakat pengempan Pura Pasek Gelgel dengan cara masuk ke dalam pura dengan memanjat tempat penyengker pura. Lalu para terdakwa membuka pintu pelinggih gedeng yang tidak terkunci yang berada di sebelah utara, namun tidak menemukan barang berharga. Karena tidak menemukan apapun akhirnya para terdakwa beralih ke gedong penyimpanan sebelah timur namun pintunya terkunci dengan gembok. Kemudian Terdakwa (II) I Nengah Wanti mengambil obeng yang sudah dibawanya, lalu memasukkan obeng ke dalam kawat hingga gemboknya terputus dan jatuh. Kemudian Terdakwa (II) I Nengah Wanti membuka pintu gedong penyimpanan dan mengambil beberapa bancang/tangkai emas dan beberapa ikat uang kepeng. Selanjutnya Terdakwa (II) I Nengah Wanti menyerahkan barang curian tersebut kepada Terdakwa (I) I Gede Mardika alias Mangku yang pada saat itu sedang berjaga-jaga mengawasi sekeliling. Lalu setelah mereka berhasil mengambil bunga emas dan uang kepeng itu para terdakwa keluar dari dalam pura dengan cara memanjat kembali tembok penyengker pura. Keesokan harinya para terdakwa berangkat menuju Karangasem untuk menjual hasil curian kepada saksi I Nengah Suparta seharga yang tidak dapat diingat lagi dan hasil penjualan tersebut

dibagi rata. Atas kejadian tersebut masyarakat mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kerugian immateriil berupa terganggunya kesakralan/kesucian pura, serta beban psikologis umat Hindhu khususnya warga masyarakat pengempan Pura Pasek Gelgel tersebut. Maka perbuatan para Terdakwa diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP. Berdasarkan deskripsi kasus diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan keadaan memberatkan dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian mengenai tindak pidana pencurian pratima di Bali, dan hasil wawancara yang diperoleh penulis dari para narasumber maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang timbul saat putusan dijatuhkan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat Bali terhadap putusan Pengadilan Negeri di Bali, karena putusan tersebut belum mengakomodir hukum adat Bali. Putusan Pengadilan Negeri hanya menjatuhkan di hal-hal yang memberatkan saja terhadap pelaku pencurian pratima. Hakim Pengadilan Negeri di Bali tidak dapat menjatuhkan sanksi adat yang berupa *sangaskaradana* yaitu sanksi terhadap mereka yang berbuat jahat dengan cara melakukan serangkaian upacara adat Bali, *arthadanda* yaitu sanksi terhadap mereka yang berbuat jahat dengan cara membayar sejumlah uang

denda, dan *kasepekan* yaitu sanksi terhadap mereka yang berbuat jahat dengan cara dikucilkan bahkan diusir dari desa pakraman. Sulitnya hakim untuk menyertakan ketiga jenis sanksi adat Bali dalam putusan dikarenakan hakim tidak punya dasar untuk menyertakan ketiga unsur itu.

DAFTAR PUSTAKA

Iman Sudiyat, 1982, *Asas-asas Hukum Adat*, edisi ke 3, Liberty Yogyakarta, Hlm 5.

I Ketut Sandika, 2011, *Pratima Bukan Berhala*, Paramita, Surabaya.

<http://samardi.wordpress.com/2012/09/17/buku-buku-yang-mengkaji-hukum-pidana-di-indonesia/>, diakses pada hari kamis 2 oktober 2014, pukul 14.05.

Tri Andrisman, 2009 *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*,

Universitas Lampung, Hlm 70.

Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 90.